

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pesantren merupakan lembaga Pendidikan tradisional di Indonesia yang memiliki nilai cukup unik yang menjadikan pesantren bisa bertahan hidup sampai sekarang sekaligus menjadikannya sebagai nilai tawar. Beda halnya dengan Pendidikan formal yang ada di Indonesia dimana sistemnya diatur oleh pemerintah tidak demikian dengan pesantren, pesantren menjadi lembaga Pendidikan yang memiliki hak otonomi dalam menjalankan segala kebijakannya baik dari segi kurikulum pendidikan maupun dari pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari yang biasanya dibiayai oleh usaha-usaha yang didirikan oleh pondok pesantren itu sendiri. Sering kali pengaruh yang besar dari suatu pondok pesantren banyak dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga yang sedang mencari massa untuk mempertahankan kekuasannya.

Perpolitikan di sebuah pesantren biasanya dipengaruhi oleh seorang Kiyai yang merupakan pimpinan dari suatu pondok pesantren karena dinilai memiliki kepemilikan power terkuat di pesantren. Pengaruh kiyai yang seperti itu dikarenakan menurut (dhofier, 1982) Pesantren diibaratkan sebagai sebuah kerajaan kecil di mana kiyai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power authority*) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Pengaruh kiyai tidak hanya kepada orang-orang yang berada di lingkungan pesantren namun masyarakat sekitar juga biasanya selalu menuruti apa yang diyakini oleh seorang kiyai karena masyarakat menganggap bahwa seorang kiyai sebagai orang yang memiliki

pemahaman agama yang luas serta tokoh yang memiliki karismatik. Selain itu seringkali tatanan agama atau kehidupan suatu masyarakat yang berada dekat dengan sebuah pesantren selalu terpengaruh dengan ajaran yang ada di pesantren begitupun sebaliknya pondok pesantren pasti menyesuaikan juga dengan budaya setempat. Sehingga pesantren dengan masyarakat ini diibaratkan dengan sebuah mata uang yang dimana posisinya saling membutuhkan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kiyai memiliki basis massa yang sangat kuat dalam perpolitikan sehingga ketika dihubungkan dengan pemilu yang dimana basis massa sangat diperlukan.

Partai politik merupakan salah satu elemen yang terdapat di dalam pemilu yang membutuhkan massa banyak untuk mendapatkan kursi DPR. Adapun partai politik sendiri menurut (Budiarjo, 2008) partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiarjo, 2008). Di Indonesia sendiri partai politik terbagi menjadi dua yaitu pertama partai politik yang berlandaskan pada ideologi islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB). Kedua partai politik yang berlandaskan pada ideologi nasionalis salah satu contohnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Kondisi perpolitikan negara yang telah lama dipengaruhi oleh agama sehingga menjadi salah satu kesempatan partai politik berbasis Islam dalam merauk massa yang banyak ketika kontestasi politik dengan cara menjalin relasi dengan berbagai lembaga keagamaan seperti halnya lembaga pendidikan agama Islam atau pesantren. Contohnya partai PPP menjadi salah satu partai yang memiliki relasi dengan pesantren. Partai ini didirikan pada 5 Januari 1973. Dalam pembentukannya partai PPP memiliki 6 prinsip perjuangan yakni prinsip ibadah, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan, serta prinsip Istiqamah. Dimana menurut Muhamad Mardiono ke enam prinsip tersebut diniatkan untuk ibadah karena partai ini merupakan partai warisan ulama yang berdirinya pun memiliki tujuan dalam mensejahterakan umat dan membangun negara menjadi *baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur*.

Kondisi partai yang demikian menyebabkan partai PPP didominasi oleh para ulama atau orang-orang yang memiliki latar agama yang kuat kalau tidak ulama ya anak dari ulama atau yang masih memiliki keterkaitan dengan ulama. Partai ini berhasil memanfaatkan kondisi wilayah dari Tasikmalaya sendiri yang merupakan wilayah dengan jumlah pesantren terbanyak di Jawa Barat. Sehingga ketika di daerah lain atau bahkan di provinsi lain minim pendukung beda halnya di kabupaten Tasikmalaya suara dari partai PPP lumayan cukup tinggi bahkan dalam sejarah partai ini pernah memenangkan pemilu di kabupaten Tasikmalaya.

Pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya menjadi tujuan dari partai PPP untuk menjalin sebuah relasi atau kerjasama karena pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren terbesar yang berada di kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah santri sekitar 7000 santri dan cabangnya sudah tersebar di berbagai daerah Indonesia. Pondok pesantren ini awal didirikan pada tanggal 7 Agustus 1967. Besarnya pondok pesantren ini tidak terlepas dari orang yang telah mendirikannya yakni KH. Khoer Affandi. KH. Khoer Affandi merupakan seorang ulama besar murid dari KH. Zaenal Mustafa dan sudah terkenal ke berbagai daerah karena konsep ceramahnya yang selalu menyentuh kalbu dan berhasil menggaet banyak jamaah.

Patronase yang terjalin antara partai PPP dengan pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya disini yakni adanya keterkaitan pada aspek politik diantara keduanya. Sudah pasti pondok pesantren memiliki pengaruh yang cukup besar ditambah dengan partai PPP yang merupakan partai berbasis islam yang dimana tidak dapat dipungkiri bahwa membutuhkan basis massa untuk mempertahankan posisinya agar bisa menempati kursi parlemen. Sehingga pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh kiyai yang besar dan mempunyai basis massa yang banyak yaitu santri, jamaah, dan alumninya dimanfaatkan oleh partai. Sebagai imbalannya sudah sangat jelas transaksi yang terjadi di pondok pesantren Miftahul Huda dengan dikabulkannya beberapa kebijakan yang menguntungkan ponpes.

Selain itu ada beberapa aspek lain terkait hubungan yang terjalin antara partai PPP dengan pondok pesantren Miftahul Huda yakni. Pertama, terkait dengan dukungan politik dari pondok pesantren, tokoh-tokoh agama Islam yang masih memiliki keterkaitan dengan pesantren diantaranya para gurunya, keluarga pesantren, santri, jejaring alumninya, serta masyarakat sekitar pesantren, apalagi pondok pesantren Miftahul Huda memiliki jejaring alumni yang cukup besar dengan jaringan alumni tertua di Jawa Barat yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Sehingga dari hal tersebut pesantren Miftahul Huda menjadi basis dukungan yang kuat bagi partai PPP untuk membangun sebuah relasi. Kedua, terkait rekrutmen kader yang dilakukan PPP dengan merekrut kader-kader yang berasal dari golongan pesantren contohnya dari pihak keluarga pesantren. Hubungan yang terjalin dari keduanya sudah dibuktikan dengan banyaknya kader yang berasal dari keluarga pesantren seperti halnya UU Ruzhanul Ulum, KH. Asep Maoshul Affandy, Sihabudin Romly, KH. Didi Abdul Hadi, H Thoriqul Huda, serta Sonhaji Ibrani Affandy. Selain dari keluarga pesantren dari golongan para santri serta alumni miftahul huda juga banyak yang menjadi kader PPP. *Ketiga*, kebijakan yang berpihak pada pesantren dibuktikan dengan ikut andilnya pondok pesantren Miftahul Huda serta partai persatuan pembangunan dalam pembentukan UU perda syariah tahun 2009 yang sekarang menjadi perda nomor 7 tahun 2014 tentang tata nilai kehidupan Masyarakat yang religius.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui kajian *literature* dari berbagai sumber berita peneliti mendapatkan data bahwasannya hubungan

antara partai PPP dengan pondok pesantren Miftahul Huda ini sudah terjalin cukup lama dibuktikan dengan orang pertama yang masuk ke dalam ranah politik di pesantren yakni UU Ruzhanul Ulum beliau memulai karier politiknya di partai PPP. Dimulai dari tahun 1987-1993 beliau menjadi pengurus Ranting PAC PPP Desa Kalimanggis dan yang paling terkenal menjadi bupati kabupaten Tasikmalaya selama dua periode serta menjadi wakil gubernur Jawa Barat.

Keberadaan UU Ruzhanul Ulum di partai PPP disusul oleh pamannya yakni KH. Asep Maoshul Affandi yang sekaligus sebagai pimpinan umum dari pondok pesantren Miftahul Huda. Beliau sudah tiga periode menjabat menjadi anggota DPR-RI dari partai persatuan Pembangunan (periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024) perwakilan dari dapil X yakni Ciamis, Pangandaran, Banjar, dan Kuningan. Kemudian keluarga pesantren lainnya yang sudah berhasil menduduki jabatan penting yakni Sihabudin Romli sebagai anggota DPRD kabupaten Tasikmalaya dapil IV periode 2019-2024.

KH. Asep Maoshul Affandy kembali mencalonkan diri di pemilu tahun 2024 sebagai calon anggota DPR-RI dapil X dan anaknya Arief Maoshul Affandy menjadi caleg DPRD Jawa Barat dapil XIII Selain itu keluarganya yang lain seperti halnya Didi Abdul Hadi yang mencalonkan menjadi caleg DPR-RI Jabar dapil XI, Thorikul Huda caleg DPRD Jawa Barat dapil XV, Sonhaji Ibrani affandy caleg DPRD Kabupaten Tasikmalaya dapil IV, Sihabudin Romli caleg DPRD kabupaten Tasikmalaya dapil IV, dan UU Ruzhanul Ulum caleg DPR-RI Jabar dapil VIII. Calon-calons diatas berangkat dari satu partai yang sama yakni partai

PPP sehingga berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwasannya partai PPP sudah seperti partai keluarga pesantren Miftahul Huda.

Pemilu serentak tahun 2024 pesantren Miftahul Huda secara resmi mengeluarkan deklarasi *One Colour* atau HAMIDA *One Colour*. Bahkan adanya pernyataan dari Plt Ketua Umum PPP (Agung Ilham Setiadi, 2023) bahwa pada pemilu sebelumnya banyak alumni yang masih berjuang di partai lain tapi di pemilu kali ini semuanya sepakat untuk satu warna satu suara dalam menjemput kemenangan melalui PPP. Deklarasi tersebut memiliki makna bahwasannya di pemilu serentak tahun 2024 Himpunan Alumni Miftahul Huda (HAMIDA) sepenuhnya hanya mendukung satu partai saja yaitu Partai PPP, semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan pondok pesantren Miftahul Huda diarahkan untuk mendukung partai PPP. Deklarasi tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari pimpinan umum pondok pesantren Miftahul Huda yakni KH. Asep Maoshul Affandy yang menyebutkan bahwasannya merasa yakin di pemilu kali ini PPP akan membawa apa kehendak umat Islam dan itulah yang menjadi alasan bahwa pondok pesantren Miftahul Huda sepakat untuk *One Colour* bersama PPP di tahun 2024.

Kabupaten Tasikmalaya sendiri memiliki tujuh daerah pemilihan untuk anggota legislatif. Pondok pesantren Miftahul Huda yang berada di kecamatan Manonjaya berada di daerah pemilihan IV. Berdasarkan data calon terpilih di dapil IV (Salopa, Jatiwaras, Cineam, Karang Jaya, Manonjaya, Gunung Tanjung)

sendiri berjumlah 7 anggota diantaranya dari partai PPP yang berada di urutan ke tiga (Rangga Jatnika, 2024).

**Tabel 1.1 Nama-Nama Anggota DPRD Terpilih Periode 2024-2029.**

No.	Nama	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1.	Jejen Jaenal	Gerindra	19.261
2.	Iyam Maryani	PDI-P	13.508
3.	H Sonhaji Ibrani	PPP	12.341
4.	Aldira Yusuf Dikrian	PAN	12.304
5.	Gumilar Akhmad	PKB	11.956
6.	Aang Budiana	Golkar	9.792
7.	Ferry Willyam	Demokrat	8.181

*Sumber: (radartasik.id)*

Adapun untuk anggota terpilih DPRD kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 berjumlah 50 orang (Purnawadi, 2024). Adapun untuk jumlah anggota terpilih dari masing-masing partai sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Perolehan Jumlah Kursi Partai Periode 2024-2029.**

No.	Partai Politik	Jumlah Anggota Terpilih
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	9
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	8
4.	Partai Golongan Karya	7
5.	Partai Persatuan Pembangunan	6
6.	Partai Amanat Nasional	4
7.	Partai Demokrat	3

8.	PKS	3
9.	Partai NasDem	1

*Data Jumlah Anggota Terpilih dari Masing-Masing Partai Periode 2024-2029.  
Sumber (ideJabar).*

Dari data tersebut menjadi perhitungan bahwasannya meskipun partai PPP tidak masuk parlemen di pusat akan tetapi masih menjadi basis massa di daerah Kabupaten Tasikmalaya hal ini dapat dilihat dari data sementara diatas bahwasannya wakil dari partai PPP yang sekaligus salah satu pengurus pondok pesantren Miftahul Huda memperoleh suara yang cukup tinggi senilai 12.341. Selain itu partai PPP juga memperoleh kursi yang cukup banyak yakni 6 kursi meskipun tidak berada di urutan teratas. Dalam hal tersebut berarti adanya hubungan patronase yakni hubungan antara patron dan klien yang terjadi antara pondok pesantren Miftahul Huda dengan partai PPP.

Sejalan dengan yang dikatakan oleh (Batubara & Asrinaldi, 2018) bahwa hubungan patron klien didasarkan pada hubungan dua arah antara orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dengan menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimiliki si patron demi mendukung si klien. Kemudian si klien memberikan balesan berupa jasa pribadi kepada patron (jasa tersebut bisa berupa peraturan-peraturan yang disahkan berdasarkan pada kepentingan si patronnya, ataupun bisa dengan menyediakan jumlah kursi yang diperlukan oleh si patron. Sedangkan (Aspinall & Sukmajati, 2015) mengklarifikasikan bentuk variasi dari patronase diantaranya pembelian suara (*Vote Buying*), pemberian-pemberian pribadi (*Individual Gifts*), pelayanan dan aktivitas (*Services and Activities*),

Barang-barang kelompok (*Club Goods*), dan proyek-proyek gentong babi (*Pork Barrel Projects*).

Penelitian terdahulu sangat diperlukan oleh peneliti sebagai gambaran untuk menentukan fokus pembahasan yang diambil sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Sehingga dalam hal ini peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diambil peneliti. Beberapa referensi tersebut diantaranya. Pertama, penelitian terkait “Relasi Kuasa antara Pondok Pesantren dan Partai Politik (Studi Kasus Buntet Pesantren dan Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon 2019)” yang dilakukan oleh Mohammad Iqbal Azad (2023). Penelitian yang dilakukannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian pada relasi patron klien yang terjadi antara pondok pesantren dengan partai politik pada masa pemilu legislatif DPRD kabupaten Cirebon pada tahun 2019. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwasannya relasi patron klien yang terjadi antara pondok buntet dengan partai PKB dikarenakan beberapa faktor diantaranya karena hubungan yang sudah terjalin sejak lama, memiliki ideologi yang sama, serta dari keduanya membawa kepentingan masing-masing yang saling melengkapi.

Kedua, penelitian terkait “Relasi Partai Politik dengan Pondok Pesantren (Studi Kasus PPP dengan Pondok Pesantren Daruttafsir Kabupaten Bogor) yang dilakukan oleh Ahmad Ramdani (2009). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian pada masa pilkada kabupaten Bogor

pada tahun 2008. Hasil yang didapatkan yakni relasi yang terjalin antara pondok pesantren dengan partai politik merupakan relasi yang bersifat individual karena terjadi antara kiyai pesantren dengan calon bupati Bogor.

Ketiga, penelitian terkait “Patronase dan Afiliasi Santri pada Partai Politik di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara” yang dilakukan oleh Hamdan Haris (2018). Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori yang digunakan adalah teori patron klien dengan teori perilaku politik ini menghasilkan bahwa teori patron klien digunakan antara kyai/ ustadz/ alumni sebagai patron dengan santrinya sebagai klien. Kepatuhan terhadap gurunya sehingga mempengaruhi perilaku politik dari para santri.

Keempat, penelitian terkait "Relasi Partai Politik dengan Basis Massa (Studi Kasus Partai Persatuan Bangsa Kabupaten Rembang dan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang)" yang dilakukan oleh Mohammad Aris Fahmi (2014). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori interaksi simbolik untuk menyimpulkan bahwa hubungan antara pondok pesantren dan partai politik terjadi karena keberadaan tokoh pesantren yang juga menjadi anggota partai politik.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulunya. Dalam penelitian ini dapat melihat perubahan politik yang terjadi di Indonesia seperti halnya hubungan yang terjadi antara pondok pesantren Miftahul Huda dengan partai PPP pada pemilu legislatif kabupaten Tasikmalaya

tahun 2024. Terjalannya relasi yang semakin kuat diantara keduanya dibuktikan dengan adanya deklarasi *One Colour* yakni satu warna mendukung satu partai yang sama yaitu partai PPP. Menurut peneliti deklarasi tersebut merupakan upaya yang cukup besar yang dilakukan oleh pesantren dalam mendukung sebuah partai karena deklarasi tersebut melibatkan semua lapisan yang berhubungan dengan pesantren baik itu pimpinannya, tokoh-tokoh gurunya, keluarga pesantren, alumni, santri, serta masyarakat sekitar pesantren. Fenomena tersebut sangat menarik sekali ketika keterkaitan diantara keduanya untuk diteliti karena adanya transaksi diantara keduanya sehingga terciptanya hubungan patron klien. Sehingga peneliti ingin meneliti bagaimana patronase yang terjadi antara pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya dengan Partai PPP pada pemilu Legislatif kabupaten Tasikmalaya tahun 2024?

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana patronase antara pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pemilu legislatif kabupaten Tasikmalaya tahun 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian Ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai patronase antara pondok pesantren Miftahul Huda Manonjaya dengan Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu legislatif kabupaten Tasikmalaya tahun 2024.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan baik itu secara teoritis maupun secara praktis, hal tersebut sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau acuan dalam penelitian-penelitian berikutnya,
- b. Bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini,

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pihak akademik, mahasiswa, masyarakat dan pihak-pihak lain terkait bagaimana lembaga pendidikan dapat dipengaruhi oleh partai politik. Selain itu kepada pihak pesantren juga dapat bermanfaat dalam pengembangan pendidikan politik di pesantren. Sedangkan untuk partai politik relasi yang terjadi antara kedua lembaga ini dapat menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan Pendidikan, sosial, dan keagamaan.